



LAPORAN DELEGASI DPR RI UN PARLIAMENTARY HEARING “SCALING UP ACTION FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: FINANCE, INSTITUTIONS, AND POLITICS

13-14 Februari 2025 New York - Amerika Serikat





LAPORAN PARTISIPASI DELEGASI BKSAP DPR RI PADA IPU UN PARLIAMENTARY HEARING 13-14 FEBRUARI 2025

*“Scaling up action for the Sustainable Development Goals: Finance, Institutions,
and Politics”*

**UN Trusteeship Council Room, UN Headquarter, New York, United States of
America**

I. Pendahuluan

Forum Parliamentary Hearing at the United Nations merupakan Forum Pertemuan Parlemen Tahunan di PBB, New York dalam bentuk Dengar Pendapat dan audiensi dengan mengusung tema: Meningkatkan aksi untuk tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Keuangan, Institusi, dan Politik.

Forum Parliamentary Hearing akan membahas secara mendalam cara-cara untuk memulai kembali Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan SDGs yang terkandung di dalamnya sebagai rencana global yang paling penting untuk memerangi kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, dan mengatur ulang ke arah yang berkelanjutan. Secara khusus, kita akan melihat cara-cara dalam memobilisasi kemauan politik dan mencapai konsensus tentang kebijakan utama, memperkuat lembaga-lembaga untuk secara efektif melibatkan semua aktor, dimulai dari parlemen, dan memobilisasi pembiayaan penting dari sumber publik.

Selanjutnya, setelah adopsi Pakta untuk masa depan beserta lampirannya pada Sidang PBB bulan September 2025 mendatang, pada sidang gabungan PBB-IPU akan berusaha

untuk memajukan komitmen terhadap percepatan SDGs. Diskusi ini juga akan memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi di antara para anggota parlemen tentang cara-cara untuk menutup kesenjangan pembiayaan untuk SDGs mengingat Konferensi PBB ke-4 tentang Pembiayaan untuk Pembangunan, di Spanyol, pada bulan Juni 2025.

Dalam Forum tahun ini terdapat 7 sub tema sidang yakni: tantangan besar SDGs: Memobilisasi kemauan politik; Pengawasan Parlemen terhadap SDGs; Kerja Sama Pembangunan dan SDGs; Menggalang Sumber Daya Domestik untuk SDGs; Krisis utang dan SDGs: Proposal untuk yang berkelanjutan; Perdagangan internasional untuk SDGs: Tantangan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan ekspor, dan; Investasi sektor swasta untuk SDGs: Peran investasi jangka panjang swasta dan Keuangan Internasional.

II. Laporan

A. Agenda

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
Rabu, 12 Februari 2025			
1.	08.00	Kedatangan Delegasi (Group 1)	John F. Kennedy International Airport NY
2.	19.10	Kedatangan Delegasi (Group 2)	John F. Kennedy International Airport NY
3.	21.00	Kedatangan Delegasi (Group 3)	Newark Liberty International Airport
Kamis, 13 Februari 2025			
4.	Pagi	Registrasi Delegasi	UN Headquarter 405 E 45th St, New York, 10017, USA
5.	10.00-10.15	Welcome remarks H.E. Mr. Philemon Yang, President of the United Nations General Assembly; Hon. Dr. Tulia Ackson, President of the Inter-Parliamentary Union	Trusteeship Council Chamber, UN Secretariat Building
6.	10.45-11.45	The deep challenge of the SDGs: Mobilizing political will	Trusteeship Council Chamber
7.	11.45-13.00	Parliamentary oversight of the SDGs: The unfinished business of institutionalization	Trusteeship Council Chamber
8.	13.00-15.00	Lunch Break	-
9.	15.00-16.30	Development cooperation and the SDGs: Making the most of aid	Trusteeship Council Chamber
10.	16.30-18.00	Raising domestic resources for the SDGs: A case for tax reforms	Trusteeship Council Chamber

Jum'at, 14 Februari 2025			
11.	10.00-11.30	The debt crisis and the SDGs: Proposals for sustainable solutions	Trusteeship Council Chamber
12.	11.30-13.00	International trade for the SDGs: The challenge of poverty eradication through export led growth	Trusteeship Council Chamber
13.	13.00-15.00	Lunch Break	-
14.	15.00-16.45	Private investments for the SDGs: The role of private long-term investments and of international finance	Trusteeship Council Chamber
15.	16.45-17.00	Closing Dr. Tulia Ackson, President of the Inter- Parliamentary Union	Trusteeship Council Chamber

B. Sesi Pembukaan

Dalam sesi pembukaan, **Presiden Majelis Umum PBB ke-79, Yang Mulia Philémon Yang**, menyambut baik acara dengar pendapat parlemen yang dihelat di ruang Dewan Perwakilan tersebut. Tema dialog adalah tepat seiring dengan rencana penyelenggaraan the 4th International Conference on Financing for Development (FfD4) yang akan digelar pada pertengahan tahun 2025.

Konferensi tersebut akan membahas mengenai upaya untuk menggali sumber daya dalam pencapaian pembangunan. Parlemen, menurutnya, memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya sekaligus menggali mekanisme-mekanisme pendanaan inovatif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Presiden IPU, Yang Mulia Tulia Ackson, mengungkapkan dengar pendapat ini merupakan respon dari ragamnya dokumen internasional yang menyebut peran parlemen dalam satu dekade ke belakang. Oleh karenanya, dalam konteks pencapaian TPB, parlemen memiliki peran penting. IPU sebagai organisasi global parlemen, mengembangkan berbagai perangkat pengetahuan untuk membantu parlemen memperkuat kapasitas khususnya dalam TPB seperti [SDGs Informed Legislative Scrutiny](#) (2025) atau [IPU SDGs Self Assesment Toolkit](#) (2016).

Kendati signifikansi peran parlemen bagi komunitas internasional semakin diakui, hasil di lapangan terkait pencapaian SDGs masih belum sesuai harapan. Ia menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan parlemen di level nasional dalam konteks TPB, yakni:

1. *Mewujudkan dukungan politik untuk menjawab mengapa TPB kurang menarik perhatian di level nasional;*
2. *Berkolaborasi dengan pemerintah dalam mekanisme pelaporan pencapaian TPB;*
3. *Memperkuat pengawasan parlemen dalam TPB;*
4. *Mengatasi tantangan kesenjangan pembiayaan TPB, termasuk dengan memperkuat peran parlemen.*

Dan Dunsky, jurnalis kawakan Kanada menjadi moderator Dengar Pendapat Parlemen tersebut. Ia menguraikan konsep diskusi yang akan mendalami upaya penguatan kelembagaan politik TPB di level nasional dan mendengar perspektif parlemen terkait isu pembiayaan pembangunan seiring dengan rencana penyelenggaraan the 4th International Conference on Financing for Development.

C. Sesi 1 – *The deep challenge of the SDGs: mobilizing political will*

1. Mr. Guy Ryder, Under-Secretary-General for Policy, United Nations

Sebagai perwakilan PBB, Mr. Guy Ryder, menyampaikan berdasarkan laporan PBB ([SDGs Report 2024](#)), status pencapaian TPB sebagai berikut:

- TPB memiliki 17 tujuan dan 169 target dengan 135 target diantaranya dapat diukur.
- Sedikitnya ada 17% target TPB (yang dapat diukur) telah mencapai target sebelum 2030.
- 18% target berproses menengah untuk menuju target 2030.
- 30% target memerlukan upaya keras.
- 18% target lainnya dalam stagnasi dan sisanya (17%) menunjukkan regresi (kemunduran).

Ia mengungkapkan pandangan TPB tidak gagal dalam agenda pembangunan. Ide dasar semestinya berawal dari bagaimana perkembangan pembangunan bila dunia tidak menyepakati adanya TPB.

Ia juga menekankan aspek multilateralisme sebagai wujud keberhasilan adanya agenda pembangunan tersebut. Tantangan global harus diselesaikan lewat multilateralisme.

Terkait dukungan politik, ia menegaskan adanya dukungan tersebut. Tetapi saat ini, dunia berada di persimpangan jalan ketika banyaknya pihak memperkuat

kepentingan nasional mereka sebagai prioritas. Guy Ryder mengusulkan perlunya rekayasa kebijakan dan penguatan *know-how* dan komunitas internasional memiliki kemampuan untuk itu.

2. Ms. Nelly Mutti, Speaker of the National Assembly, Zambia

Yang Mulia Ms. Nelly Mutti menguraikan tantangan terkait dukungan politik untuk TPB yakni adanya kepentingan nasional yang menguat sebagai upaya menjaga keseimbangan janji elektoral. Pencapaian TPB tergantung pada prioritas pemimpin sementara prioritas pembangunan tergantung pada kelangsungan masa politik dari pemimpin pemerintahan.

Di sisi lain, pengaruh dari *the power group* yang kuat dan enggan mendorong kebijakan sejalan dengan TPB juga menjadi tantangan. Kelompok kekuasaan/kepentingan kadang melihat reformasi sebagai ancaman keberlangsungan mereka. Di sisi lain, politisi, parlemen, pembuat kebijakan hingga masyarakat memiliki sedikit pemahaman mengenai TPB.

3. Prof. Jeffrey Sachs, President, Sustainable Development Solutions Network

Prof Jeffrey Sachs, memberikan pemahaman perspektif berbeda mengapa TPB perlu menjadi agenda pembangunan. Ia mendorong negara melihatnya sebagai bagian agenda ekonomi, mengingat TPB adalah agenda investasi, khususnya pada sumber daya manusia (kesehatan, pendidikan, sarana air bersih, infrastruktur, dan lainnya). Hasil dari itu adalah bisnis dapat beroperasi lebih baik, kekayaan dan investasi nasional dapat meningkat. Ia menyarankan negara-negara untuk fokus pada anak-anak dan anak muda agar mereka mendapatkan hak lengkap seperti sekolah, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Berbicara terkait utang, ia mengkritisi rating utang seperti IMF World Bank Debt Credit Sustainability Framework yang kurang tepat. Ia juga menggagas alternatif pembiayaan global, termasuk untuk pendanaan PBB bila Amerika Serikat menarik diri dari pembiayaan. Dunia internasional perlu untuk menarik perpajakan internasional dari penerbangan, pengapalan dan lainnya berskala global. Pajak global diperlukan untuk membiayai barang publik global (*global public goods*). Prof Jeffrey Sachs mendesak adanya keadilan mendasar pada arsitektur keuangan global.

Terkait peran parlemen, ia menyarankan parlemen untuk memastikan eksekutif menjalankan kebijakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan pencapaian hak pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Ia berpesan agar parlemen untuk tidak

membiarkan negara-negara kaya dan bank multilateral mendikte arah pembangunan negara.

D. Sesi 2 - *Parliamentary oversight of the SDGs: the unfinished business of institutionalization*

1. Mr. Adama Bictogo, Speaker of the National Assembly, Cote d'Ivoire

Yang Mulia Mr. Adama Bictogo merespon tema diskusi dengan menekankan berbagai krisis seperti inflasi keuangan, energi dan lainnya mengekang kemampuan nasional mencapai TPB. Oleh karenanya, ia menekankan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mencapai TPB.

Salah satu area yang ia ajukan agar parlemen dapat memperkuat perannya adalah di dalam pengawasan dana bantuan asing yang ditujukan untuk proyek-proyek TPB ataupun yang dapat memperkuat keahlian masyarakat. Apabila pengawasan dalam proyek-proyek tersebut diperkuat, maka, dampak dari pendanaan untuk proyek dimaksud akan terasa.

2. H.E. Mr. Ulugbek Lapasov, Permanent Representative of Uzbekistan to the United Nations

Yang Mulia Mr. Ulugbek Lapasov mencatat dan mengakui eksistensi keterlibatan parlemen di level dan agenda global yang semakin meningkat. Ia kemudian mengurai peran parlemen Uzbekistan dalam monitoring TPB seperti adanya Panitia Khusus (Pansus) TPB yang diketuai oleh Senat (*Oliy Majlis Senati*). Di level internasional, Uzbekistan juga mendorong peningkatan peran parlemen dengan menginisiasi resolusi Majelis Umum PBB tentang [*Enhancing the role of parliaments in accelerating the achievement of the SDGs \(A/RES/77/159\)*](#), resolusi kali pertama di PBB tentang peran parlemen dan SDGs.

3. Ms. Marina Ponti, Global Director, UN SDG Global Campaign

Ms. Marina Ponti, menerjemahkan TPB sebagai alat politik yang efektif untuk membangun kepercayaan publik. Di level global, PBB saat ini fokus pada pencapaian TPB terkait isu keadilan ekonomi dalam utang, ketidaksetaraan gender, dan aksi iklim. Oleh karenanya pencapaian di area tersebut akan menjadi obyek evaluasi.

Ia mendorong sebagai mekanisme politik, pihak-pihak berkepentingan perlu membangun komunikasi yang efektif agar dapat memiliki koalisi dalam mencapai TPB baik di level global maupun nasional. Salah satu mekanismenya adalah dengan melibatkan media dan masyarakat sipil.

Ketua Delegasi DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (FPKS), pada kesempatan tersebut menyerukan penguatan kolaborasi global antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam pencapaian TPB. Indonesia selama ini merupakan negara terdepan dalam pelibatan pencapaian TPB sejak awal. Dalam penyusunan TPB, Indonesia menjadi bagian penting sebagai anggota Tim Sekjen PBB yakni High Level Panel of Eminent Persons untuk agenda pasca-2015.

Pada 2017, Perpres TPB yang menjadi dasar legal pelaksanaan agenda global tersebut disahkan, menunjukkan tingginya komitmen negara dalam melaksanakan SDGs. Secara konsisten Indonesia juga melaporkan pencapaian perkembangan SDGs ke PBB melalui pelaporan nasional sukarela.

Namun demikian, upaya pencapaian SDGs di level nasional memerlukan mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karenanya kolaborasi pengawasan antara parlemen dengan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan TPB yang sudah diadopsi sebagai program pembangunan nasional berjalan sesuai rel-nya. DPR telah membentuk Panja SDGs untuk memantau pencapaian tujuan tersebut. Ada pula [Portal Monitoring SDGs](#) yang menyajikan data pencapaian di level provinsi.

Saat ini Indonesia berada di ranking 78 dari 193 negara dalam pencapaian SDGs secara global. Tetapi upaya melindungi lingkungan hingga memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, hingga lapangan pekerjaan yang semuanya menjadi bagian SDGs perlu diawasi agar semakin cepat tercapai. Ia menggarisbawahi urgensi pentingnya kolaborasi pengawasan bersama masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki jaringan dan kekuatan akar rumput dalam pengawasan program-program terkait SDGs. Sementara Parlemen memiliki suara politik dalam mengkoreksi aksi pemerintah yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

E. Sesi 3 - *Development cooperation and the SDGs: making the most of aid*

1. H.E. Ambassador Lok Bahadur Thapa, Permanent Representative of Nepal to the United Nations

Yang Mulia Lok Bahadur Thapa menguraikan bagaimana bantuan pembangunan resmi (*Official Development Assistance/ODA*) atau bantuan dari negara donor dapat meningkatkan atau mereformasi sistem pemerintahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Oleh karenanya, agar ODA efektif, parlemen harus proaktif melakukan peran pengawasan baik dalam konteks ODA maupun dalam pelaksanaan kebijakannya.

Parlemen, khususnya di negara penerima, harus memiliki peran menerima atau menolak bantuan asing, sebagai pemegang mandat publik dan pengawas jalannya pemerintahan. Di negara donor, parlemen berperan untuk mengkaji dengan teliti dan menyetujui rencana pemberian bantuan ke negara lain.

2. Ms. Susan Brown, Assistant Secretary General and Director, Bureau for External Engagement and Advocacy, UNDP

Ms. Susan Brown memberikan contoh langkah-langkah praktis mengenai bagaimana parlemen dapat berperan dalam pengawasan bantuan asing. Ia mendorong parlemen untuk secara detail melihat kontrak hibah atau bantuan asing ataupun pinjaman asing sebagai upaya melihat masuk akal tidak segala syarat dan ketentuan dari pemberian dana asing dimaksud.

Mekanisme lainnya adalah pengawasan bersama dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan dana asing tersebut. Pengalaman UNDP membuktikan parlemen yang turut serta mengawasi menghasilkan proyek dengan keluaran positif.

3. Ms. Nilima Gulrajani, Principal Research Fellow, Development and Public Finance Team, ODI Global

Ms. Nilima Gulrajani memaparkan realita mengenai legitimasi bantuan asing yang mendapatkan tantangannya dalam beberapa tahun ke belakang. Hal ini berkaitan dengan model penjajahan gaya baru atau neokolonialisme melalui bentuk bantuan asing. Selain itu persepsi publik terhadap bantuan asing ternyata tidak statis. Saat ini ia menilai tujuan pemberian dana bantuan asing tidak lagi jelas.

Bantuan asing pada akhirnya banyak mengabaikan kontrak sosial dengan masyarakat. Dengan demikian, ada potensi bantuan asing menjadi terdiskreditkan. Beberapa negara saat ini telah mereorientasi atau mengubah pendekatan ODA mereka. Amerika Serikat bahkan saat ini tengah menghentikan pemberian dana bantuan asingnya secara total.

Ia mengatakan upaya untuk memperbaiki situasi dimaksud salah satunya dengan, bagi negara di Global North, memperkuat solidaritas ke negara-negara lainnya terutama negara berkembang dan tertinggal. Sementara di negara Global South perlu memiliki perspektif untuk tidak hanya mengandalkan dana bantuan asing dalam mencapai TPB. Parlemen idealnya memiliki komisi independen terkait ODA, mengingat bantuan asing kerap tak sejalan dengan prioritas negara penerima. Selain itu, ia mendorong pemangku kepentingan ODA negara donor untuk melokalisasi pelaksanaan bantuan asing. Artinya, penerima dan lebih jauh lagi,

pelaku di level lokal mendapatkan kuasa, kepercayaan dan kontrol memadai dalam melaksanakan bantuan asing.

DELEGASI DPR RI, Rachmat Gobel (F Partai Nasdem), pada rapat dengar pendapat tersebut mendorong komunitas parlemen untuk memiliki standar global pengawasan dana bantuan asing. Rachmat mengungkap tantangan parlemen dalam pengawasan bantuan asing. Konstitusi Indonesia dan UU tentang Keuangan Negara memberi mandat seluruh perjanjian Internasional yang berdampak ke keuangan negara harus mendapat persetujuan DPR.

Kendati demikian, selama ini penjelasan pemerintah masih bersifat makro. Ia memberi contoh bantuan pertanian senilai Rp 1 triliun dari lembaga keuangan Internasional untuk Project Upland, yang didedikasikan untuk pengembangan kapasitas dalam pertanian terintegrasi di dataran tinggi. Bantuan pertanian penting bagi 17,2 juta petani kecil. Selain itu sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan menyerap 40 juta lapangan pekerjaan pada 2022.

Namun, parlemen kesulitan mengukur dampak, dan pemerataan distribusi bantuan dimaksud sebagai akibat kurang detailnya informasi bantuan asing yang diterima DPR. Untuk itu, ia menyerukan agar komunitas parlemen global bekerjasama menghasilkan panduan internasional untuk menciptakan standar yang sama dalam mekanisme pengawasan bantuan asing.

F. Sesi 4 - *Raising domestic resources for the SDGs: a case for tax reforms*

1. Mr. Navid Hanif, Assistant Secretary-General for Economic Development, UN Department of Economic and Social Affairs

Mr. Navid Hanif mengungkapkan kecenderungan skema perpajakan yang saat ini semakin menurun (regresif). Hal ini membuat negara bergantung pada skema pencarian pendapatan lainnya termasuk melalui perpajakan tidak langsung. Ketergantungan yang berlebihan pada skema perpajakan tidak langsung tidak akan bagus secara jangka panjang.

Untuk itu, ia menjelaskan adanya seruan untuk mewujudkan aturan main perpajakan internasional dalam cara yang berkeadilan. PBB memiliki [Komite Pakar untuk Kerja Sama Internasional untuk Urusan Perpajakan](#) yang membantu negara-negara mendesain kebijakan perpajakan. Saat ini rezim global untuk perpajakan internasional adalah 15% dari rasio PDB.

Negara yang memiliki sistem perpajakan yang kuat dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik yang perlu diimbangi dengan meningkatnya transparansi pengelolaan pendapatan negara.

2. Mr. Ian Gary, Director Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), and Member of the Global Alliance for Tax Justice

Mr. Ian Gary memberi perspektif banyaknya korporasi global mengakali penghindaran pajak melalui mekanisme *Base Erosion Profit Shifting* (BASE). Di sisi lain, negara-negara barat juga kerap malah menjadi tuan rumah dari upaya penghindaran pajak. Oleh karenanya, transparansi perpajakan yang lebih luas adalah penting, terutama untuk mendorong pelaporan korporasi tentang apa yang mereka lakukan dan tidak lakukan.

FACT dan Global Alliance for Tax Justice mendorong parlemen untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Oleh karenanya mereka merekomendasikan parlemen mengesahkan undang-undang yang memberi perlakuan pajak tinggi ke orang kaya, memperkuat transparansi pemilik manfaat utama (*beneficial ownership/BO*), mencari cara yang lebih sempurna untuk memperkuat skema perpajakan bagi perusahaan-perusahaan tambang, dan lainnya.

3. Ms. Marlene Nembhand Parker, Deputy Commissioner General, Legal Services Division, Tax Administration Jamaica

Ms. Marlene mengelaborasi peran otoritas perpajakan di Jamaika. Berdasarkan pengalamannya, parlemen memiliki peran kritikal dalam tahap penyusunan atau perubahan undang-undang perpajakan dan dalam mengelola pelaksanaan undang-undang tersebut.

DELEGASI DPR RI, Ravindra Airlangga (F Partai Golkar), menekankan sistem perpajakan Internasional harus berkeadilan dan menyentuh skema-skema bisnis baru yang sebelumnya tak tersentuh seperti ekonomi digital. Sistem perpajakan Internasional juga perlu memastikan korporasi global dapat dipajaki di masing-masing negara tempat dia beroperasi.

Indonesia telah menerapkan global minimum tax (GMT) untuk korporasi multinational yang beroperasi di Indonesia sebesar 15% dengan dasar OECD/G20 Inclusive Framework. Di sisi lain, PBB telah menyepakati pembentukan komisi negosiasi antarpemerintah untuk penyusunan Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Kerja Sama Internasional Perpajakan. Ia berharap OECD/G20 Inclusive Framework dan rencana Konvensi Internasional Perpajakan dari PBB dapat bersifat saling

melengkapi sekaligus dapat menjadi solusi perpajakan bagi ekonomi digital. Perpajakan penting untuk meningkatkan sumber daya domestik dalam mewujudkan pelayanan publik dari negara.

G. Sesi 5 – *The debt crisis and the SDGs: Proposals for sustainable solutions*

Sesi ini membahas tantangan keberlanjutan bagi utang yang sejauh ini terlihat seperti tidak berkelanjutan mengingat negara kerap mengesampingkan urusan layanan publik demi membayar utang. Sesi diawali dengan pembukaan dari sejumlah panelis yakni:

1. Mrs. Shari Spiegel, Director of the Financing for Sustainable Development Office UN DESA

Shari Spiegel mengawali pembahasa dengan dua sorotan yakni mengenai hal meminjam dan mekanisme ketika negara dalam keadaan bangkrut (tidak bisa membayar utang). Hal meminjam bagi negara adalah lingkaran setan, semakin banyak pinjaman menyebabkan krisis bagi pembangunan berkelanjutan karena negara tidak bisa fokus pada pelayanan publik. Dalam hal negara bangkrut dan ataupun proses restrukturisasi, tantangan yang ditemui adalah tidak adanya pengadilan niaga yang mengurus skema kepailitan negara. Hal ini semakin sulit bila dikaitkan dengan status kreditor, mengingat tidak ada konteks kreditor paling awal atau akhir dan juga dalam konteks negara, institusi kreditor sangat bervariasi.

2. Jason Rosario Braganza, Executive Director African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD)

Jason Rosario mengelaborasi 5P sebagai hasil pengamatannya dalam krisis utang yang mempengaruhi negara berkembang khususnya Afrika. 5P tersebut adalah:

- *Power* (Kuasa): Ia melihat seringnya ada ketidaksetaraan antara pihak yang bernegosiasi. Asimetri kuasa dalam arsitektur utang yang condong ke kreditor ketimbang peminjam. Di beberapa negara berkembang, khususnya di Afrika, seperti Zambia, Ghana, Ethiopia, mengabaikan agenda pembangunannya demi melunasi utang (atau demi kepentingan kreditor) yang terus menerus.
- *Politics* (Politik): Ia melihat dalam konteks tersebut belum ada *political will* yang benar-benar ada untuk mengatasi semua hal dimaksud, khususnya agar krisis utang tidak memburuk. Selain itu, ada ideologi untuk membangun memerlukan utang. Ideologi tersebut, dengan tanpa mempertimbangkan bentuk lain pembiayaan pembangunan atau transformasi ekonomi akan berbahaya. Negara-negara perlu mempertanyakan kembali mengapa negara berkembang kembali terjerat utang, mengapa negara berkembang memiliki defisit fiskal, defisit perdagangan dan lainnya, meski sebagian di masa lalu level utang hampir nol melalui mekanisme HIPC ataupun MDRI (*Multilateral Debt Initiative*).

- *People* (Manusia): Selama ini ide utang dan pembiayaan utang tidak berpusat pada manusia, ataupun pembangunan pelayanan publik. Negara didorong untuk fokus pada urusan utang, ketimbang pendidikan, air, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini menggeser peran negara dari kontrak sosial mereka ke kontrak demi keuntungan kreditor (*from social contract to profit creditor contract*).
- *Production* (Produksi): Negara-negara hingga saat ini belum fokus pada upaya meningkatkan kapasitas produksi atau transformasi ekonomi. Utang kerap berkontribusi pada ketidakmampuan negara untuk membangun ketimbang mendorong pembangunan. Hal ini berakibat fatal seperti ketika COVID-19, negara-negara Afrika yang hanya mengekspor material mentah (*raw materials*) saja, menyebabkan produksi global macet karena tidak bisa ekspor. Dampaknya, negara-negara tersebut juga mengalami kemandegan ekonomi. Oleh karenanya, parlemen perlu memastikan penggunaan utang agar dapat menjadi katalis transformasi ekonomi. Selain itu, ia mendorong negara untuk melihat peran institusi multilateral karena tidak dapat berperan banyak dalam mendorong transformasi ekonomi negara-negara.
- *Private* (Swasta): Sektor swasta tidak dapat menjadi gantungan dalam urusan publik. Ketika berhadapan dengan urusan publik, negara tidak perlu dipaksa mengadopsi solusi berbasis pasar sektor swasta. Ia mendorong arsitektur global bergeser dari penerapan pertimbangan pasar ataupun fokus ke kreditor dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, sarana air dan lainnya.

Pada kesempatan itu ia menyarankan tiga solusi yakni mendemokratisasi restrukturisasi utang demi mengatasi asimetri kuasa, memperkuat posisi kolektif di regional untuk menggarisbawahi bahanya krisis utang, dan di level nasional memperkuat peran parlemen dalam pengawasan utang, dalam mengawasi syarat ketentuan utang, hingga kerangka hukumnya.

3. Jil Dauchy, CEO Potomac Group

Sebagai bagian dari konsultan strategi keuangan independen ke pemerintah dan sektor publik yang berutang, Jil menyampaikan empat observasi yakni (i) investasi dibutuhkan untuk mencapai SDGs sangat besar; (ii) krisis utang bersifat global; (iii) cara untuk keluar dari krisis pembangunan adalah dengan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang langka; (iv) parlemen penting untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

Ia mengungkap fakta terkait situasi utang negara. Hampir separuh negara berpendapatan rendah (35 dari 68 negara) berada dalam risiko tinggi atau krisis utang. Sekitar 50% dari negara berpendapatan menengah memiliki risiko tinggi utang tetapi masih berkelanjutan dan 9% menuju arah utang tak berkelanjutan.

Negara maju juga mengalami peningkatan utang. Amerika Serikat memiliki utang senilai US\$ 35 triliun atau 123% dari PDB mereka. Uni Eropa juga mengalami peningkatan utang, bahkan sebelum peningkatan anggaran pertahanan dan pembangunan kembali Ukraina. Ini menunjukkan tidak adanya ruang untuk merespon krisis dengan baik.

Ia menyarankan perlunya perubahan dalam aspek pembiayaan pembangunan dengan lebih fleksibel, inovatif dan berorientasi pasar. Ada negara-negara yang berhasil keluar dari krisis seperti Argentina, Lebanon, Ekuador, El-Salvador, Sri Lanka yang mengetatkan obligasinya dan pasar merespon perubahan-perubahan tersebut.

Inovasi dalam pembiayaan meningkat dengan adanya surat utang/obligasi hijau, sosial, atau yang terkait dengan aspek berkelanjutan meningkat pada kuartal ketiga 2024 mencapai US\$ 33,4 miliar, 35% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ia juga mengurai sejumlah negara terkini yang mengeluarkan inovasi dimaksud seperti Chile, Uruguay, Republik Dominika yang mengeluarkan US\$ 750 juta obligasi khusus untuk proyek perubahan iklim, Turkiye pada 2023 mengeluarkan obligasi hijau untuk 86 aktivitas di proyek hijau, Qatar yang meluncurkan US\$ 2,5 miliar obligasi hijau—pertama di Timur Tengah—untuk energi terbarukan, pembaruan infrastruktur dan real estate ramah lingkungan. Inovasi lain adalah terkait debt swap hingga penerapan klausul risiko (klausul tunda / *pause clause*) sebagai cara pengendalian utang.

Parlemen oleh karenanya, berperan penting dalam memastikan utang dan pembiayaan donor transparan dan sejalan dengan kebijakan nasional. Pengawasan yang kuat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat anggaran, memprioritaskan layanan publik ketimbang urusan utang. Pengawasan baik di donor dan penerima meningkatkan kepercayaan dan efisiensi.

DELEGASI DPR RI, diwakili Hon. Elpisina (FPKB) menyoroti strategi seperti apa yang bisa digunakan negara untuk mengelola utang lebih berkelanjutan mengingat negara-negara banyak yang mengalokasikan anggarannya untuk pembayaran utang lebih banyak ketimbang layanan publik. Ia menggarisbawahi perlunya mekanisme restrukturisasi utang yang tidak hanya memperpanjang pembayaran utang atau mengorbankan layanan publik.

Ketiga panelis dalam penutup sesi menggarisbawahi pentingnya peran parlemen dalam urusan pengawasan utang, dan menyoroti tentang ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian utang. Selain itu penguatan legislasi domestik terkait

utang juga diperlukan. Anggota Parlemen juga didorong mendesak Kementerian Keuangan mempublikasi rencana utang dan mengkritisnya untuk membangun kepercayaan publik terkait kemampuan negara mengelola utang. Parlemen juga perlu melihat *zero draft* (rancangan awal) yang akan menjadi keputusan dari the 4th International Conference on Financing for Development (FfD4).

H. Sesi 6 – *International trade for the SDGs: The challenge of poverty eradication through export led growth*

1. Mr. Thomas Schnoll, Permanent Observer OECD to UN

Thomas Schnoll mengungkapkan ada dua elemen bagi parlemen untuk dapat berkontribusi pada aspek perdagangan internasional. Yang pertama adalah dialog sebagai mekanisme menjembatani kepentingan. Berikutnya adalah transparansi khususnya dalam era mis dan dis-informasi. OECD memiliki kontribusi dalam hal ini khususnya dalam penyediaan data berbasis bukti (*evidence-based data*).

Dalam hal peluang dan tantangan bagi perdagangan untuk pembangunan. Selama 30 tahun terakhir, perdagangan internasional meningkat dan mendorong ekonomi negara berkembang bertumbuh. Dari 1995 ke 2023, secara keseluruhan meningkat dari 43% ke 59%. Peningkatan perdagangan adalah aspek penting membantu negara berkembang untuk naik status. Namun, banyak negara yang masih terperangkap pada komoditas ekspor bernilai rendah, menghambat pertumbuhan produktivitas.

Dalam skema rantai pasokan global, ada peluang bagi negara berkembang dalam perdagangan internasional untuk fokus pada perakitan, komponen, manufaktur, atau jasa. OECD memiliki inisiatif yang mengkaji dan mendesain strategi tertentu untuk peningkatan industrialisasi. Ada tiga elemen terkait, *Pertama*, penting berinvestasi untuk mengembangkan upaya pembelajaran. Rantai pasok global harus menjadi platform pertukaran pengetahuan. *Kedua*, menarik investor dengan tujuan memaksimalkan manfaat lokal. Kemitraan kuat antara investor asing dan perusahaan lokal sangat penting. *Ketiga*, mengantisipasi dan beradaptasi pada tren yang membentuk lanskap perdagangan dan investasi internasional.

OECD Global Outlook memprediksi kesenjangan pembiayaan SDGs pada 2030 senilai US\$ 6,4 triliun jika tidak ada perubahan besar. Angka perdagangan global diperkirakan mencapai US\$ 25 triliun. Jika negara berkembang dapat terintegrasi dengan baik dalam rantai pasokan global, maka, sebagian kesenjangan pembiayaan SDGs dapat teratasi.

2. Mr. Juan Jose Martinez Badillo, Chief, UN Trade and Development, NY Office

Juan Jose Martinez Badillo menyampaikan UNCTAD dibentuk atas pandangan keterhubungan antara perdagangan dan pembangunan. Banyak negara berkembang mengandalkan perdagangan untuk menghasilkan pendanaan, baik sebagai sumber pertumbuhan ataupun penguatan mata uang (*hard currency*).

Ada kebutuhan untuk investasi dalam mengembangkan kapasitas perdagangan negara-negara berkembang. Elemen yang diperlukan adalah ruang fiskal. Di level internasional, hasil keputusan KTT PBB untuk Masa Depan yakni Pact for the Future juga menekankan beberapa aspek perdagangan internasional seperti non-diskriminasi dan lainnya.

Transformasi ekonomi memerlukan teknologi. Sayangnya, tata kelola hak atas kekayaan intelektual saat ini tidak membuka ruang teknologi ke arah yang diperlukan. Ia juga mengungkapkan aspek lainnya yakni terkait investasi. UNCTAD mendorong terbentuknya perjanjian investasi baru yang dapat mendorong negara-negara berkembang mewujudkan tujuan pembangunan mereka.

Parlemen memerlukan pemahaman komprehensif meliputi teknologi, pendanaan, hingga perdagangan sebagai bagian dari pengawasan kebijakan industrial. Parlemen idealnya adalah pemain politik utama yang harus bisa membawa semuanya ke arah yang sama.

3. Ms. Melinda St. Louis, Director, Public Citizen's Global Trade Watch

Melinda St Louis menerangkan organisasinya sebagai perwakilan organisasi konsumen yang bekerjasama dalam kemitraan Global South dan Global North untuk advokasi kebijakan perdagangan yang adil dan setara.

Ia menilai perdagangan bebas didominasi kepentingan perusahaan multinasional Global North, masyarakat sipil dipinggirkan, menciptakan defisit demokrasi yang besar. Ia mencontohkan, konstitusi AS memandatkan legislatif dalam urusan perdagangan dengan negara asing. Tetapi, mereka mendelegasikannya ke eksekutif. Di AS juga memiliki Trade Advisory System, yang merepresentasikan kelompok perusahaan multinasional dan kerap menyusun aturan perdagangan sendiri.

Imbas dari mekanisme tersebut adalah aturan perdagangan yang tidak memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, tetapi, condong kepada yang disukai perusahaan multinasional. Ia mencontohkan, aturan investasi AS yang membuka ruang perusahaan menggugat pemerintah apabila pemerintah merugikan investasi perusahaan, adanya ketidakseimbangan kebijakan

perdagangan secara semantik seperti di pertanian dengan subsidi yang dapat diterapkan oleh negara-negara Global North sementara negara berkembang tidak dapat menerapkan larangan ekspor atau hal lainnya. Langkah ini berakibat pada terkuncinya negara Global South untuk hanya melakukan ekspor material mentah ke negara maju tanpa kesempatan untuk menaikkan rantai nilainya.

Upah pekerja Global North dimurahkan ke wilayah yang paling rendah, sementara di Global South dieksploitasi. Masyarakat sipil global mendorong transformasi sistem perdagangan global yang meminta akuntabilitas korporasi dan mendorong perlindungan HAM.

Parlemen berperan dalam mengawasi pemerintah, mendorong transparansi dalam proses pengambilan kebijakan perdagangan, mendesak prioritas domestik vital yang mengatur aktivitas korporasi domestik tidak dirusak oleh perjanjian perdagangan dan investasi.

DELEGASI DPR RI, diwakili Hon. Rahmat Gobel (F-Nasdem), menekankan perlunya sistem perdagangan internasional dievaluasi. Saat ini, kebijakan perdagangan malah menjadi alat tawar politik. Inkonsistensi dari negara-negara yang cenderung pilih-pilih kebijakan yang menguntungkan semakin tinggi. Parlemen perlu terlibat secara lebih kuat dalam negosiasi perdagangan bebas. Komunitas parlemen global perlu mengoreksinya dan oleh karenanya, DPR RI mendorong bersama-sama untuk mencari cara terbaik akan dapat bergerak bersama selain aktif terlibat dalam forum IPU Parliamentary Conference on the WTO semata.

I. Sesi 7 – Private investments for the SDGs: the role of private long-term investments and of international finance

Pada sesi ketujuh, selain panelis yang menyampaikan pandangan mereka dalam isu investasi, **KETUA DELEGASI DPR RI**, Dr. Mardani Ali Sera (FPKS) juga mengambil peran dengan menyoroti tantangan bagi negara-negara dalam upayanya meningkatkan pendapatan negara melalui investasi.

Indonesia memiliki sejumlah inovasi investasi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek SDGs seperti peluncuran SDGs bond hingga ke level investor retail. Dari sisi jenis investasi, Indonesia juga telah meluncurkan Environment, Social and Governance (ESG) Framework agar investasi yang masuk lebih sejalan dengan semangat Pembangunan Berkelanjutan. SDGs bond diluncurkan pada 2021 dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia untuk itu.

Namun demikian, investasi memiliki tantangan bila dikaitkan dengan skema perpajakan, mengingat pengambil kebijakan perlu menyeimbangkan kebijakan terhadap dua hal tersebut.

Tren investasi adalah dengan memberi insentif khususnya melalui insentif perpajakan. Di sisi lain, negara perlu meningkatkan pendapatan lewat perpajakan. Apalagi saat ini Indonesia telah menerapkan Global Minimum Tax senilai 15% untuk korporasi global.

J. PERTEMUAN-PERTEMUAN BILATERAL

Selain mengikuti rapat dengar pendapat, Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan parlemen negara sahabat pada Jumat, 14 Februari 2025.

1. Qatar Shura Council

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Ketua Delegasi, Dr. Mardani Ali Sera dan Anggota Delegasi, Ravindra Airlangga, Rachmat Gobel, dan Elpisina bertemu dengan Y.M. Wakil Ketua Parlemen Qatar, Dr. Hamda bint Hassan Al Sulaiti, di UN Indonesian Lounge, Jumat, 14 Februari 2025.

Pada pertemuan tersebut, kedua parlemen mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia – Qatar yang semakin kokoh. Pada pertemuan tersebut, Delegasi DPR RI mengapresiasi eksibisi World Social Summit 2025 yang diadakan Qatar di Markas Besar PBB. 2nd World Social Summit akan diselenggarakan pada 4-6 November 2025 di Doha, Qatar.

Ketua Delegasi DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, mendorong agar Parlemen Qatar juga dapat menghelat agenda parlemen sebagai bagian dari World Social Summit dimaksud. Parlemen Qatar mengapresiasi usulan dimaksud. Ketua Delegasi juga menyampaikan BKSAP DPR RI telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Qatar, sebagai bagian dari pembentukan kembali 102 GKSB.

Lebih lanjut, Ketua Delegasi DPR RI mengapresiasi kepemimpinan dan peran Qatar di sejumlah organisasi internasional termasuk Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC). Ia menyambut baik Doha sebagai tuan rumah 11th Conference of the State Parties to UNCAC Desember mendatang dan berharap GOPAC dapat berperan aktif dalam agenda PBB dimaksud.

2. Iraqi Council of Representatives

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Ketua Delegasi, Dr. Mardani Ali Sera dan Anggota Delegasi, Ravindra Airlangga, Rachmat Gobel, dan Elpisina juga menerima Y.M.

Wakil Ketua DPR Irak, Dr. Shakhawan Abdullah, di UN Indonesian Lounge, Jumat, 14 Februari 2025.

Kedua Delegasi berdiskusi mengenai upaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kemerdekaan Palestina serta hak-hak asasi masyarakat Palestina di forum-forum internasional seperti IPU. Pada [150th IPU Assembly and related meetings](#) yang akan digelar di Tashkent, Uzbekistan, 5-9 April 2025, Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional IPU, akan membahas penyusunan resolusi berkaitan dengan Palestina, yakni *The role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine*.

Kedua parlemen berharap dapat memperkuat dukungan untuk mengesahkan resolusi terkait, mengingat sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, IPU belum dapat mengambil sikap melalui resolusi, bahkan melalui dua *emergency items* yang diajukan berturut-turut pada IPU ke-148 dan 149.

3. Republic of Korea National Assembly

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Ketua Delegasi, Dr. Mardani Ali Sera dan Anggota Delegasi, Ravindra Airlangga, dan Elpisina menerima kehadiran Anggota Parlemen Korea Selatan Mrs. Lee Jae Jung dan Mr. Jiho Cha di UN Indonesian Lounge, Jumat, 14 Februari 2025.

Ketua Delegasi DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan kebahagiaannya dapat bertemu dengan sahabat dari Korea Selatan. Parlemen Korea Selatan telah secara aktif bertemu dengan DPR RI dalam beberapa kesempatan di Jakarta. Ia menyampaikan kabar baik terkait pembentukan 102 GKS di DPR RI, dan GKS DPR RI – Parlemen Korea Selatan menjadi salah satu yang direaktivasi.

Anggota Delegasi, Ravindra Airlangga mengungkapkan apresiasi Korea Selatan yang telah menyerap banyak tenaga kerja Indonesia dan berharap kerja sama di sektor ketenagakerjaan dan pengiriman tenaga kerja ke Korea Selatan dapat berlanjut dalam skema yang konsisten melindungi dan menghormati hak-hak tenaga kerja migran termasuk tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan.

Delegasi Parlemen Korea Selatan, Mrs. Lee Jae Jung, menyampaikan apresiasi atas kesan-kesan Delegasi DPR RI. Ia menyampaikan perkembangan terbaru mengenai situasi politik nasional terkait proses hukum dalam pemakzulan Presiden. Selain itu, ia mengharapkan agar perkembangan politik terbaru tersebut dapat disampaikan kepada Pimpinan DPR RI. Ia juga memberikan secara langsung surat tertulis dari Pimpinan Parlemen Korea Selatan yang berisi perkembangan terkini situasi politik

nasional di Korea Selatan dan kesediaan untuk bertemu dan berdiskusi secara virtual terkait hal tersebut.

III. **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

1. Agenda IPU – UN Parliamentary Hearing dan pertemuan-pertemuan bilateral berlangsung dengan lancar dan bermanfaat.
2. Isu sumber daya, dukungan politik, dan kelembagaan pengawasan pencapaian TPB menjadi bahasan mendalam dengan paparan-paparan panelis yang menekankan pada aspek keberadilan, keseimbangan peran Global North dan Global South, dan penguatan peran parlemen.
3. IPU – UN Parliamentary Hearing ini merupakan pertemuan persiapan untuk menjaring pandangan anggota IPU terkait pembahasan hasil keputusan the 4th International Conference on Financing for Development, yang akan digelar di Spanyol, Juni-Juli 2025 ini.
4. Parlemen ideal untuk terlibat dalam proses pengawasan pencapaian TPB termasuk dalam hal penyusunan Laporan Monitoring Sukarela (*Voluntary National Report*) TPB.
5. Parlemen memiliki peran signifikan dan perlu berperan mengawasi beragam perjanjian internasional terkait utang, dana bantuan asing, maupun aspek-aspek luar negeri lainnya yang berpengaruh bagi kepentingan publik dan keuangan negara serta memastikan transparansi penerimaan utang ataupun dana bantuan asing dimaksud.
6. Dukungan terhadap isu Palestina teruraikan melalui pertemuan bilateral dan dengan potensi pengesahan rancangan resolusi di Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional IPU pada IPU Assembly ke-150, 5-9 April 2025, di Tashkent, Uzbekistan.

B. Saran

1. DPR RI untuk dapat menyampaikan hasil laporan ini kepada komisi terkait, khususnya Komisi XI dan Badan Anggaran.
2. DPR untuk dapat membangun pusat data informasi mengenai utang dan dana bantuan asing/hibah asing yang diterima Indonesia, lengkap dengan detail informasi terkait jenis perjanjian, hingga syarat dan ketentuannya, sebagai platform referensi informasi untuk memperkuat sistem pengawasan parlemen.
3. BKSAP DPR RI untuk dapat berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri cq Perwakilan Tetap Republik Indonesia New York mengenai *zero draft* dokumen the 4th International Conference on Financing for Development untuk dapat

memperjuangkan penekanan penguatan peran parlemen dalam skema pengawasan keuangan, hibah asing, dan utang.

4. BKSAP DPR RI untuk konsisten berkomunikasi dengan Bappenas dalam proses penyusunan VNR TPB 2025.
5. BKSAP DPR RI untuk memberi perhatian khusus pada penyusunan resolusi *the role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine* yang akan dibahas dan disepakati pada IPU ke-150, 5-9 April 2025, di Tashkent, Uzbekistan.

IV. PENUTUP

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi delegasi pada IPU United Nations Parliamentary Hearing 2025 dapat terlaksanakan dengan baik.

Ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada Duta Besar Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat beserta jajaran atas bantuan dan dukungan serta fasilitas yang diberikan kepada Delegasi DPR RI dan Sekretariat sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat Jendral DPR RI, Biro Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, dan Tenaga Ahli atas dukungan teknis dan substansi sejak sebelum dan selama pertemuan berlangsung.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai pustaka sejarah partisipasi DPR RI dalam kegiatan diplomasi parlemen melalui keikutsertaan dalam forum-forum antar parlemen. Laporan ini juga dapat menjadi rujukan bagi keikutsertaan DPR RI dalam forum-forum antar parlemen lainnya di masa mendatang.

Demikian Laporan Delegasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Delegasi DPR RI atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Jakarta, 19 Februari 2024

Ketua Delegasi

Tertanda

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.





@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id